

KEBIJAKAN BERBASIS NEW SOCIAL MOVEMENT

Thufaila Anggraini Inayudha¹

¹Universitas Brawijaya

Email : anggrainith@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji peran gerakan sosial baru dalam mengadvokasi reformasi agraria sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik yang dihadapi oleh masyarakat yang terpinggirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi yang inklusif dan kolaboratif terhadap konflik agraria melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu politik dan ilmu sosial. Melalui wawancara dengan empat informan kunci dan empat narasumber, data kualitatif dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema penting. Temuan menunjukkan distribusi tema sebagai berikut: 'Ego Sektoral' (31,4%), 'Relasi Kuasa' (22,9%), 'Interaksi Sosial' (34,3%), dan 'Kebijakan Publik' (11,4%). Temuan ini menunjukkan bahwa gerakan sosial memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tetapi ego sektoral masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini menyerukan kerangka kerja kebijakan yang menjembatani kesenjangan ini dan mempromosikan pendekatan yang lebih kooperatif dan adil terhadap reforma agraria.

Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru, Kebijakan, Interaksi Sosial.

ABSTRACT: This study examines the role of new social movements in advocating for agrarian reform as a response to the systemic injustices faced by marginalized communities. The research aims to offer inclusive and collaborative solutions to agrarian conflicts through an interdisciplinary approach that integrates political science and social sciences. Through interviews with four key informants and four sources, qualitative data was gathered and analyzed to identify critical themes. The findings showed a distribution of themes as follows: "Sectoral Ego" (31.4%), "Power Relations" (22.9%), "Social Interaction" (34.3%), and "Public Policy" (11.4%). The findings suggest that social movements play a significant role in developing policies that address the needs of marginalized groups, but sectoral egos are a Therefore, this research calls for policy frameworks that bridge these divides and promote more cooperative, equitable approaches to agrarian reform.

Keywords: New Social Movement, Policy, Social Interaction.

PENDAHULUAN

Ketimpangan agraria telah menjadi isu fundamental yang memengaruhi kehidupan masyarakat pinggiran, khususnya masyarakat pinggiran dan petani kecil (Pickering, 2023). Penguasaan lahan yang tidak merata, konflik tanah, dan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar telah menciptakan ketidakadilan yang sistematis. Masyarakat kehilangan akses terhadap tanah nenek moyang mereka, yang tidak hanya merupakan aset ekonomi tetapi juga bagian dari identitas dan budaya mereka (Alfan, 2022). Masalah ini kerap diperburuk oleh kebijakan agraria yang bias terhadap kepentingan elite politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, kebutuhan akan reforma agraria sebagai respons terhadap ketidakadilan menjadi sangat mendesak.

Reforma agraria bukan hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga melibatkan perjuangan politik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas (Alfan, 2022). Di tengah keterbatasan kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil (Warouw, 2005), *new social movements* atau gerakan sosial baru telah muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan agraria. Gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk melawan dominasi kekuasaan, tetapi juga membangun solidaritas, mengadvokasi hak atas tanah, dan mendorong kebijakan yang lebih progresif (Mustopa et al., 2020). Gerakan sosial berbasis masyarakat ini mengedepankan inklusivitas dan partisipasi aktif kelompok terdampak dalam proses pengambilan keputusan.

Hubungan antara konflik agraria, ketertindasan masyarakat, dan kebijakan seringkali bersifat kompleks. Ketertindasan masyarakat pinggiran tidak hanya berasal dari kehilangan akses terhadap tanah tetapi juga dari marginalisasi suara mereka dalam proses politik (Pickering, 2023). Kebijakan agraria yang diambil sering kali tidak memihak masyarakat bawah, melainkan lebih mendukung kepentingan korporasi besar. Hal ini menimbulkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya memahami konflik agraria sebagai persoalan ekonomi tetapi juga sebagai masalah sosial, budaya, dan politik yang saling terkait (Gafuraningtyas et al., 2024).

Pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memahami dan menyelesaikan persoalan agraria secara komprehensif. Ilmu politik berperan dalam menganalisis relasi kuasa dan kebijakan publik, sementara ilmu sosial membantu memahami bagaimana masyarakat membangun interaksi, solidaritas, dan gerakan untuk memperjuangkan hak-

haknya. Dengan menggabungkan perspektif ini (Limon, 2023), penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika konflik agraria dan bagaimana gerakan sosial baru dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *new social movements* dalam mendorong agenda reforma agraria sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat pinggiran. Dengan menekankan pendekatan interdisipliner, penelitian ini berharap dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan kolaboratif untuk mengatasi konflik agraria. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat, interaksi sosial, dan kekuatan kelompok dalam upaya mewujudkan kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih progresif, yang tidak hanya mengatasi masalah redistribusi lahan tetapi juga membangun keadilan sosial secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma transformasi dengan fokus pada evaluasi kebijakan Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018) melalui konsep *new social movement*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali interpretasi mendalam dalam konteks politik. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, catatan lapangan, dan observasi (Sobari, 2023). Analisis dilakukan melalui software QDA Miner 6.11 dengan interpretasi tabulasi frekuensi dalam mengavaluasi kebijakan reforma agraria dalam konteks keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan serta Peluang dalam Kompleksitas

Implementasi Kebijakan Agraria di Kota Batu

Dalam mengkaji tantangan dan peluang evaluasi kebijakan reforma agraria, pendekatan interdisipliner antara ilmu politik dan ilmu sosial menjadi penting untuk menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan yang ada. Kebijakan seperti UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Perpres No. 86 Tahun 2018, meskipun bertujuan redistributif, sering kali terhambat oleh ego sektoral antar pemangku kepentingan dan birokrasi yang tidak fleksibel. Tantangan ini semakin diperburuk oleh ketidakseimbangan kekuasaan, di mana masyarakat pinggiran harus berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak

atas tanah mereka (Alfan, 2022). Sebagai contoh, perjuangan masyarakat Desa Tulungrejo di Kota Batu mencerminkan bagaimana implementasi kebijakan membutuhkan waktu panjang untuk memberikan keadilan sosial yang inklusif.

Dalam konteks kebijakan agraria, NSM menawarkan perspektif baru dengan menekankan identitas kolektif, nilai-nilai kemanusiaan, dan budaya lokal. Menurut (Shah, 2003), gerakan sosial tidak hanya bertujuan untuk reformasi kebijakan tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan organisasi masyarakat sipil (Civil Social Organization/CSO) menjadi katalisator yang mendampingi komunitas dalam mengatasi konflik yang bersifat non material, untuk melakukan perubahan dalam kehidupan melalui kebijakan publik (Pichardo, 1997). Hal ini sejalan dengan gagasan (Melucci, 1980) bahwa NSM dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan peluang untuk solusi berbasis partisipasi aktif.

Peluang kebijakan juga tercermin dalam revisi regulasi, seperti penggantian Perpres No. 86 Tahun 2018 menjadi Perpres No. 63 Tahun 2023, yang memberikan ruang lebih luas bagi pengelolaan lahan non-produktif. Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat, tetapi juga menghapus batasan-batasan lama dalam redistribusi aset agraria. Dalam konteks ini, keterlibatan aktor-aktor lokal, seperti masyarakat desa, CSO, dan instansi terkait, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan agraria yang lebih adil dan dinamis.

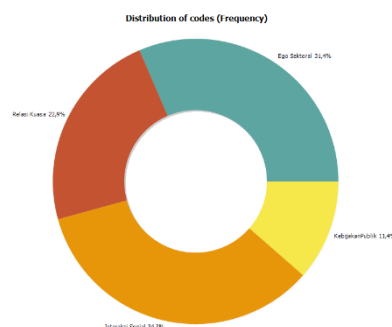
Secara teori, NSM juga memberikan cara pandang baru untuk memahami hubungan antara perubahan kebijakan dan dinamika gerakan sosial. Menurut (Nash, 2005) gerakan sosial modern tidak hanya berorientasi pada perubahan struktural tetapi juga pada transformasi budaya yang memperkuat kapasitas kolektif masyarakat yang bersifat non-material. Ini terlihat dalam penguatan solidaritas lokal di Desa Tulungrejo yang berhasil memperjuangkan hak-hak agraria mereka melalui konsolidasi multi-aktor. Dengan demikian, teori NSM mengajak kita untuk melihat gerakan sosial sebagai wadah untuk merekonstruksi politik melalui interaksi antara kekuatan struktural dan kapasitas aktor-aktor lokal.

Evaluasi kebijakan reforma agraria tidak hanya menyoroti tantangan tetapi juga membuka peluang untuk pendekatan kebijakan yang lebih kolaboratif dan progresif. Dengan melibatkan NSM, masyarakat pinggiran dapat memperkuat posisinya dalam

proses pengambilan keputusan, menciptakan ruang baru untuk dialog, dan memperluas definisi keadilan sosial dalam konteks lingkungan agraria (Nash, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perubahan legislasi tetapi juga pada kemauan politik untuk memberdayakan masyarakat melalui mekanisme partisipatif yang inklusif dan adil.

Revolusi Kreatif: Implementasi Kebijakan Progresif dengan *New Sosial Movement*

Studi ini menyelidiki peran "gerakan sosial baru" (NSM) dalam mendorong agenda reforma agraria. Pendekatan interdisipliner sangat penting dalam kerangka ini karena menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik dan ilmu sosial. Dalam ilmu politik, pemahaman tentang konsep "relasi kuasa" dan "kebijakan publik" sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan kekuatan politik mempengaruhi akses terhadap sumber daya agraria (Tarrow, 1998). Meskipun demikian, ilmu sosial membantu memahami "interaksi sosial" yang terjadi di antara kelompok masyarakat dalam konteks budaya sosial yang berdampak pada dinamika masyarakat pinggiran. Peneliti melakukan adanya wawancara dengan 8 aktor penting pada pelaksanaan reforma agraria yang terdapat di Kota Batu, Berikut disajikan hasil tabulasi wawancara diolah menggunakan software QDA Miner 6.11:



Sumber: Diolah oleh Peneliti menggunakan Software QDA Miner 6.11 (2024)

Penemuan utama pada penelitian ini adalah betapa pentingnya hubungan kuasa dalam mendorong atau menghambat keberhasilan reforma agraria. Relasi kuasa, yang mewakili persentase 22,9% dari analisis data, menggambarkan perbedaan antara kelompok masyarakat pinggiran dan pemerintah yang menguasai sumber daya agraria. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk masalah ketidaksetaraan dalam pembagian lahan. Oleh karena itu, peran "gerakan sosial baru" menjadi sangat penting dalam

menyeimbangkan hubungan kuasa karena mereka sering dianggap sebagai lawan dari "ego sektoral" yang menghambat proses kerja sama antar berbagai aktor yang terlibat dalam kebijakan agraria.

Ego sektoral, elemen yang mendominasi 31,4 persen dari analisis data, mencerminkan batas-batas yang dibuat oleh berbagai sektor atau kelompok, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Seringkali, hal ini menghambat pencapaian tujuan bersama yang lebih inklusif, seperti pembagian lahan yang adil. Pendekatan interdisipliner sangat penting untuk mendorong percakapan antar sektor, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama, dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pinggiran (Pichardo, 1997).

Menurut angka 11,4%, peran kebijakan publik dalam menyelesaikan konflik agraria belum sepenuhnya membantu masyarakat pinggiran. Kebijakan saat ini sering dibuat tanpa mempertimbangkan ketimpangan dan dinamika sosial. Oleh karena itu, kebijakan agraria harus diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pinggiran. Menurut penelitian ini, kebijakan agraria harus mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan bersama, serta redistribusi lahan. Dengan ditelitinya studi kasus ini membuktikan lambatnya perubahan kebijakan agraria yang cenderung reaktif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan akan berdampak pada keadilan distributif bagi masyarakat pinggiran (Rawls, 1971).

Salah satu temuan paling penting dari penelitian ini adalah peran interaksi sosial dalam memperkuat persatuan kelompok masyarakat. Interaksi sosial sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan memajukan peran "gerakan sosial baru" dalam mempengaruhi kebijakan agraria, dengan frekuensi 34,3%. Gerakan sosial baru sering kali menjadi tempat bagi kelompok yang terpinggirkan untuk berkumpul dan menyuarakan keinginan mereka. Akibatnya, interaksi sosial menjadi sangat penting dalam proses perubahan sosial dan politik yang lebih besar, termasuk reformasi agraria (Turkowski & Walczak, 2023).

Dengan menggabungkan ilmu politik dan ilmu sosial dalam reformasi agraria, pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kebijakan agraria dapat dicapai. Dari sudut pandang politik, penting untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang menguntungkan masyarakat pinggiran. Dari sudut pandang sosial, penting untuk memahami bagaimana hubungan antar anggota

masyarakat dapat mendorong atau menghalangi perubahan sosial yang diinginkan. Berdasarkan pada konvergensi kedua bidang ini, kita mulai menyadari bahwa kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan kekuasaan dan faktor sosial.

Berdasarkan analisis di atas, ada sejumlah saran kebijakan yang dapat diterapkan untuk memerangi ketidakadilan agraria. Pertama, kebijakan agraria harus diubah untuk menjadi lebih adil dan inklusif, dan masyarakat pinggiran harus dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, sangat penting untuk mengurangi kebanggaan sektor dengan membuat ruang untuk diskusi antar sektor yang terbuka dan bekerja sama. Ketiga, menegaskan peran "gerakan sosial baru" dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan yang lebih progresif. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam kebijakan agraria.

Rekomendasi Model Acuan: Pendekatan "*Framework* Manajemen Kolaboratif" dapat digunakan untuk mengintegrasikan dimensi-dimensi di atas:

1. Dialog Multi-Stakeholder: Membentuk forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi untuk mendiskusikan kebijakan agraria berbasis nilai inklusif.
2. Penguatan Posisi Masyarakat Pinggiran: Memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi masyarakat pinggiran.

KESIMPULAN

Metode interdisipliner untuk memahami kebijakan yang didasarkan pada gerakan sosial baru memberikan pandangan yang kaya tentang dinamika konflik agraria. Menurut analisis hubungan kekuasaan, ketidakseimbangan struktural antara masyarakat elit dan masyarakat pinggiran terus menjadi penghalang utama untuk mencapai reformasi agraria yang adil. Redistribusi lahan dan pelaksanaan kebijakan progresif sering dihambat oleh dominasi segelintir aktor. Sebaliknya, peran kebijakan publik yang inklusif menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat dicapai melalui upaya partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, dari sudut pandang ilmu sosial, interaksi sosial merupakan dasar yang sangat penting untuk membangun solidaritas masyarakat. Terbukti bahwa gerakan sosial baru dapat menyatukan kelompok marginal melalui pendekatan yang didasarkan

pada nilai, budaya, dan interaksi langsung. Namun, kebanggaan sektoral sering kali menghalangi kerja sama lintas pihak di tingkat lokal dan nasional. Oleh karena itu, model yang disarankan untuk mengatasi konflik agraria dan membangun kebijakan agraria yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial adalah pendekatan yang menggabungkan kekuatan interaksi sosial dengan strategi politik dan kebijakan yang bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Z. (2022). Implementasi PERPRES 86/2018 tentang Reforma Agraria di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. In *Zainul Alfan/ JIAP* (Vol. 8, Issue 3).
- Gafuraningtyas, D., Setiatin, N., & Anggrivianto, T. (2024). Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 38(1). <https://doi.org/10.22146/mgi.84620>
- Limon, A. (2023, May 5). *Pentingnya Penelitian Interdisipliner untuk Mencapai Kebenaran yang Utuh*. <https://Greennetwork.Id/Opini/Pentingnya-Penelitian-Interdisipliner-Untuk-Mencapai-Kebenaran-Yang-Utuh/>.
- Melucci, A. (1980). The new social movements: A theoretical approach. *Social Science Information*, 19(2), 199–226. <https://doi.org/10.1177/053901848001900201>
- Mustopa, A. J., Sadono, D., & Hapsari, D. R. (2020). KOMUNIKASI GERAKAN SOSIAL MELALUI PENYADARAN PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(01), 80–93. <https://doi.org/10.46937/18202028111>
- Nash, J. (2005). Social movements : an anthropological reader. *Semantic Scholar*.
- Pichardo, N. A. (1997). New Social Movements: A Critical Review. *Annual Review of Sociology*, 23(1), 411–430. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.411>
- Pickering, D. (2023). Political activation and social movements: Addressing non-participation in Aotearoa New Zealand. *Sociology Compass*, 17(1). <https://doi.org/10.1111/soc4.13022>
- Rawls, J. (1971). *A THEORY OF JUSTICE*.
- Shah, G. (2003). Review of Social movements, old and new: A postmodernist critique, by R. Singh. In *Social movements, old and new: A postmodernist critique* (2nd ed., Vol. 5, pp. 309–311). Sociological Bulletin.

- Sobari, W. (2023). *TEMPLATE PENULISAN METODE PENELITIAN untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Bidang Ilmu Politik*.
<https://doi.org/DOI:10.6084/m9.figshare.21856740>
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511813245>
- Turkowski, A., & Walczak, G. (2023). Making new ‘Solidarities.’ *Intersections*, 9(1), 42–61. <https://doi.org/10.17356/ieejsp.v9i1.1084>
- Warouw, N. (2005). PEKERJA INDUSTRI INDONESIA, GERAKAN BURUH, DAN NEW SOCIAL MOVEMENT: MERAJUT SEBUAH KEMUNGKINAN. *JURNAL ANALISIS SOSIAL*, 10 (2).